

**FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN
MELAKUKAN FRAUD : ANALISIS PERSEPSI ASN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Haeru Purwanto, Rita Anugerah dan Rasuli

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Riau

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of the pressure, opportunity, rationalization and capability factors on fraud in the government sector. The population in this study were all civil servants who worked in Regional Device Organizations in Indragiri Hulu Regency, totaling 32. The author took a sample of 5 people in each organization. Samples taken consist of Budget Users / Budget User Proxies, Finance subdivision heads, Financial Management Officials, Expenditures Treasurers, Treasurers and Goods Treasurers. The data analysis technique used in this study is a Structural Equation Modeling analysis technique. The results of this research are that pressure, opportunity and capability have a positive and significant effect on fraud in the government sector of Indragiri Hulu Regency. While rationalization has a negative and significant effect on fraud in the government sector of Indragiri Hulu Regency. There are still weaknesses in the use of internal control systems due to limited information and time, due to environmental pressure, or due to limited ability; collusion or negative collaboration of a group of people and intentional violations by superiors. Often the occurrence of unethical behavior in the form of the use of official vehicles for personal use, there are officials who use positions to request more facilities than partners / partners outside the applicable provisions and the attitude of omitting employees when other employees act detrimentally in the environment where they work.

Kata Kunci : Pressure, Opportunity, Rationalization and Capability.

PENDAHULUAN

Kecurangan dapat terjadi di berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Kecurangan yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Menurut studi Transparency International tahun 2013, Indonesia berada di peringkat ke 64 negara terkorup di dunia dan peringkat pertama di tingkat Asia Pasifik.

Mengapa Orang-Orang Terlibat Fraud? Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Abdullahi dan Mansor (2015), bahwa hal tersebut didasari oleh adanya Fraud Diamond Theory di dalamnya terdapat Capability (Kemampuan) merupakan ketika seseorang memiliki komponen kemampuan yakni posisi, kecerdasan, ego dan tingkat stres untuk melakukan tindak kecurangan. Ada Empat alasan utama mengapa orang-orang melakukan fraud, yaitu : tekanan, kesempatan, suatu cara untuk merasionalisasi bahwa tindakan fraud diperbolehkan, Kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Dewasa ini banyak kasus fraud yang menyentuh berbagai bidang pemerintahan terutama birokrasinya, diantaranya yakni kasus korupsi Bupati Indragiri Hulu yang melibatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), beberapa Pejabat Daerah dan pejabat keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, misalnya pada tahun 2013 terdapat dugaan pidana korupsi dana APBD dengan memalsukan dokumen dan berkas keuangan sehingga kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 116 miliar. yang berujung dengan ditahannya mantan Bupati Indragiri Hulu dalam surat putusan MA.No.336.K'Pid.Sus/2014. dengan putusan kurungan delapan tahun penjara dan denda dua ratus juta rupiah.

Akuntansi pemerintahan mempunyai tiga tujuan, yaitu (1) Menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika. (2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintah secara sehat. (3) Membantu pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat (Chan 2003 dalam Wilopo 2008). Jenis kecurangan (fraud) yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Secara umum korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi (Alatas, 1987). Korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Sementara tipe korupsi adalah korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang). Tipe korupsi yang terakhir yaitu clientelism (pola hubungan langganan). Menurut teori Fraud Triangle Cressey (1953) melalui penelitiannya menyatakan bahwa seseorang melakukan kecurangan (Fraud) disebabkan oleh 3 faktor, yaitu :

1. Pressure

Montgomery et al. (2002) dalam Rukmawati (2011) mengatakan tekanan/motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu nyata (direct) dan bentuk persepsi (indirect).

Bentuk merupakan tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi kondisi kehidupan yang nyata yang dihadapi oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan. Kondisi tersebut dapat berupa kebiasaan sering berjudi, kecanduan obat terlarang, atau menghadapi persoalan keuangan. Tekanan dalam bentuk persepsi merupakan opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan seperti misalnya executive need. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada pressure yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan (financial stability), tekanan eksternal (external pressure), kebutuhan pribadi (personal financial need), dan target keuangan (financial targets).

2. Opportunity

Menurut Montgomery et al. (2002) dalam Rukmawati (2011) kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakterdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah dalam hal pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan. SAS No. 99 menyebutkan bahwa peluang pada financial statement fraud dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah nature of industry, ineffective monitoring, dan organizational structure. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, kontrol dan upaya deteksi dini terhadap fraud.

3. Rationalization

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, kompensasi, promosi, dll.) dan perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

Penyebab fraud menurut Bologna et al. (1993) juga dapat dijelaskan dengan GONE Theory, terdiri dari 4 (empat) faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang dalam hal ini berperilaku fraud. Keempat faktor tersebut adalah :

1. Greed atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang;
2. Opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya;
3. Needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar; dan
4. Exposure atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Sementara menurut Teori Fraud Diamond merupakan teori yang menjadi dasar atau latar belakang untuk seseorang dalam melakukan kecurangan yang disajikan pertama kali oleh Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Abdullahi, Mansor dan Nuhu (2015). Dalam Fraud Diamond menambahkan komponen Capability/ kemampuan setelah 3 komponen yang terdapat dalam Fraud triangle Theory yang dikemukakan oleh Cressey (1953), yaitu rationalization, pressure, dan opportunity. Seseorang yang karena tekanan atau rasionalisasi mungkin akan melakukan kecurangan jika ada kesempatan. Kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin kecil jika tidak ada kesempatan. Perangkat yang dapat digunakan untuk memperkecil terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan adalah dengan mengimplementasikan pengendalian internal yang memadai. Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Abdullahi, Mansor dan Nuhu (2015) berpendapat bahwa meskipun tekanan berdampingan dengan kesempatan dan rasionalisasi, tidak mungkin untuk melakukan tindak kecurangan kecuali komponen keempat yakni Capability/ kemampuan dengan komponen yakni posisi, kecerdasan, ego dan tingkat stres merupakan dasar seseorang melakukan tindak kecurangan. Dengan kata lain, potensi pelaku harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan Fraud.

Mangkuprawira (2009:196) menyatakan bahwa kompensasi merupakan bentuk pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat bagi karyawan dan insentif yang memotivasi karyawan bekerja keras dalam mencapai produktivitas kerja yang semakin tinggi. Handoko (2013) menyatakan bahwa kompensasi adalah pemberian pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan hasil kerja atau balas jasa pegawai yang berwujud nominal (uang) yang diberikan majikan kepada pegawainya.

Menurut James R Davis, C Wayne Alderman, & Leonard A Robinson (sesuai dengan SAS No. 55) : Pengendalian Internal adalah seluruh kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang masuk akal agar tujuan organisasi (entity) dapat tercapai. Menurut Mulyadi (2012:165) pengertian pengendalian intern adalah: “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen”.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2008). Ditinjau darisudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Dr. Djokosantoso Moeljono kultur organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan Menurut Robbins (1996:289), budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Menurut Schein (1992:12), budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi.

Ada beberapa beberapa penelitian yang mendasari pengaruh Tekanan (Pressure) terhadap kecenderungan terjadinya Fraud dilingkungan pemerintah diantaranya kesesuaian kompensasi akibat semakin tingginya kebutuhan, penelitian yang dilakukan sebelumnya Sulistiyowati (2012), bahwa kepuasan kompensasi menyimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Terdapat persamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2009), menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan kepuasan kompensasi juga tidak berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak pidana korupsi. Hasil analisis ini tidak mendukung teori yang ada, bahwa seseorang yang terpuaskan kompensasinya tidak akan melakukan reaksi kompromistis dalam bentuk tindakan korupsi (Darsono, 2001). Jensen and Meckling (1976) menjelaskan dalam teori keagenan bahwa pemberian kompensasi yang memadai ini membuat agen (manajemen) bertindak sesuai dengan keinginan dari prinsipal (pemegang saham). Yaitu dengan memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan perusahaan. Pemberian kompensasi ini diharapkan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

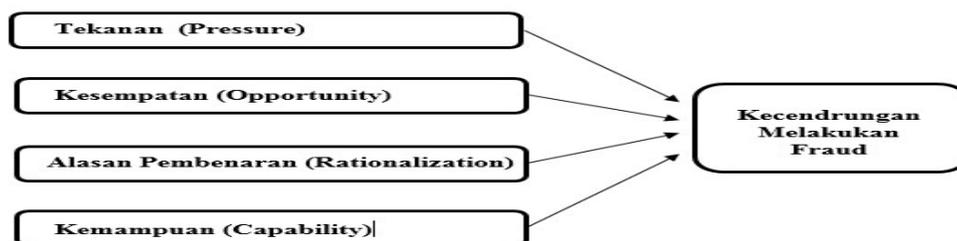
Kesempatan (Opportunity) dapat juga diakibatkan oleh lemahnya sistim pengendalian, dalam penelitian yang dilakukan Wilopo (2009), menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Pernyataan tersebut didukung juga oleh Smith et al., (1997), Beasley (1996), Beasley et al., (2000), Reinstein (1998), Matsumura (1992), dan Abbot et al., (2009) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan dalam penelitian lain Wilopo (2009) menunjukkan bahwa secara partial pengendalian intern birokrasi tidak secara signifikan mempengaruhi fraud. Dengan adanya perbedaan hasil.

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat.

Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud disektor pemerintahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan adalah Alasan Pembenaran (Rationalization) misalnya perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Menurut CIMA (2002) dalam Wilopo (2009) berpendapat bahwa budaya perusahaan dengan standar etika yang rendah akan memiliki resiko kecurangan akuntansi yang tinggi. Hasil penelitian Wilopo (2009) menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada perusahaan. Perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang positif terhadap kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis dari birokrasi / manajemen akan memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintahan. Semakin tinggi tingkat perilaku tidak etis birokrasi, semakin tinggi tingkat kecurangan akuntansi pemerintahan.

Kemampuan (Capability) adalah faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan tindakan Fraud, salah satu penyebabnya adalah asimetri informasi, menurut COSO (2004), lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasi, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinannya, didalam penelitian Rae and Subramaniam (2008), bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan etis dengan prosedur internal control yang memoderasi adanya pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kecurangan karyawan. Dari adanya penelitian tersebut, peneliti tertarik menguji apakah ada pengaruh secara langsung antara gaya kepemimpinan terhadap terjadinya fraud di sektor pemerintahan, dengan asumsi bahwa semakin baik gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud dalam organisasi tersebut.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Lintas Timur Km.4 Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu - Riau. Jangka waktu penelitian dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 5 (lima) orang pada 32 (Tiga puluh dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sampel diambil berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan dibagian keuangan pada disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Kasubag Keuangan, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang. Peneliti dalam pengambilan sampel adalah 10% dari jumlah populasi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertimbangan tersebut berdasarkan jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif. Sehingga jumlah sampel adalah 116 pegawai. Kuisisioner yang akan diolah adalah kuisisioner yang kembali dalam keadaan tidak rusak.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis SEM (Structural Equation Modeling). SEM (Structural Equation Modeling) adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. SEM merupakan keluarga statistik multivariate dependent, SEM memungkinkan dilakukannya analisis di antara beberapa variabel dependen dan independen secara langsung (Hair et al, 1995) dikutip dalam Yamin dan Kurniawan (2009:3). SEM yang berbasis component atau variance merupakan alternatif covariance dengan pendekatan component based dengan PLS yang bertujuan sebagai prediksi. Variabel laten didefinisikan sebagai jumlah dari indikatornya. PLS merupakan metode analisis yang powerful, karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data juga tidak harus berdistribusi normal multivariate(indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar. PLS selain dapat mengkonfirmasi teori, juga untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten sehingga dalam rangka penelitian berbasis prediksi PLS lebih cocok untuk menganalisis data. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi unidentified model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden adalah menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian ini. Dengan menguraikan identitas responden maka akan dapat menggambarkan tentang subjek penelitian yang akan diteliti. Diketahui bahwa pada umumnya Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu adalah laki-laki dengan persentase 56,25 orang. Dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat sebagai Aparatur Sipil Negara, sangat diperlukan loyalitas yang tinggi, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan diharapkan tidak terhalang oleh hal-hal lain yang tidak berkaitan. Umumnya ASN perempuan lebih memprioritaskan keluarga daripada karir sehingga jabatan-jabatan struktural lebih banyak diisi oleh laki-laki. Kemudian diketahui bahwa pada umumnya Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu berumur 40-49 tahun dengan persentase 46,43%. Usia dapat menjadi suatu sebab turunnya kinerja seseorang. Ada suatu keyakinan bahwa dengan menuanya usia, ketrampilan seorang individu terutama kecepatan, kecekatan, kekuatan atau stamina, akan menurun dengan sejalannya waktu. Usia 40-49 tahun adalah usia produktif seorang Aparatur Sipil Negara. Dengan produktifnya seorang ASN maka diharapkan dalam menjalankan tugasnya lebih maksimal.

Selanjutnya diketahui bahwa pada umumnya Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu berpendidikan S1 dengan persentase 66,67%. Kondisi ini mencerminkan ASN memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sehingga dengan tingkat pendidikan yang baik maka akan dapat mendukung penyelesaian pekerjaan. Kemudian umumnya Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu memiliki masa kerja > 10 tahun persentase 56,70%. Lamanya masa kerja maka akan dapat meningkatkan keahlian atau kemampuan dalam bekerja. Masa kerja mempunyai hubungan positif dengan produktivitas pekerjaan, masa kerja yang cukup lama dapat memberikan pengalaman yang cukup besar untuk peningkatan kinerja.

Kompensasi yang diterima sudah dinilai sesuai oleh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu. Kesesuaian tersebut terlihat dari kesesuaian antara gaji dengan pekerjaan yang dilakukan, tunjangan kerja dan hak-hak ASN yang diberikan sesuai kebutuhan dan utuh serta adanya promosi jabatan atas dasar prestasi kerja. Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa kesesuaian kompensasi yang dirasakan ASN akan berdampak pada profesionalnya ASN dalam bekerja, tercukupinya kebutuhan akan mengakibatkan berkurangnya tekanan kebutuhan yang dirasakan.

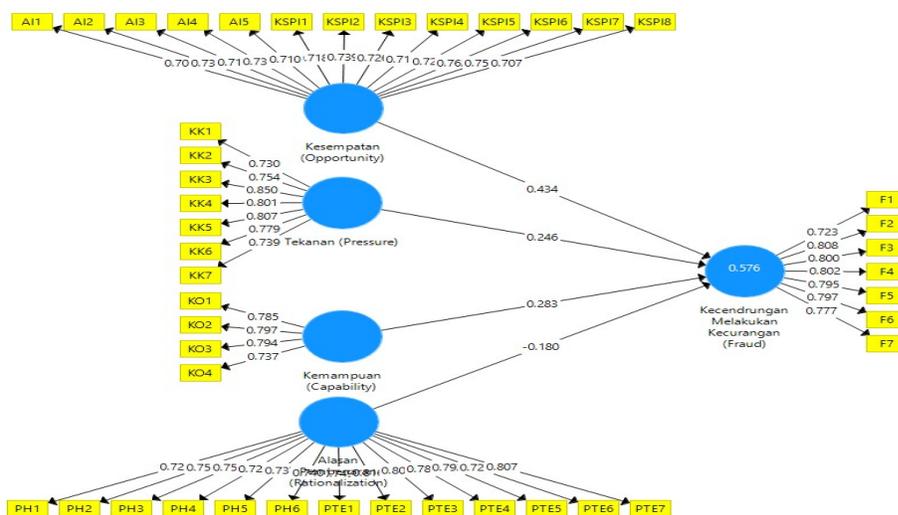
Kemudian sistem pengendalian internal yang diterapkan sudah dinilai efektif oleh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu. Walaupun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penggunaan sistem pengendalian internal yang dimanfaatkan oleh ASN yang disebabkan terbatasnya informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena terbatasnya kemampuan; kolusi atau kerjasama negatif sekelompok orang serta pelanggaran dengan sengaja oleh atasan. Asimetri informasi yang diterapkan sudah dinilai baik oleh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu. Data transaksi keuangan merupakan salah satu yang bersifat rahasia sehingga hanya bagian keuangan yang mengetahuinya. Dari hasil tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa dengan sistem pengendalian internal yang efektif dan adanya asimetri informasi yang proporsional dapat menutup kesempatan atau peluang bagi ASN untuk melakukan kecurangan.

Selanjutnya perilaku Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu cukup etis. Namun dari hasil tersebut masih terdapat perilaku yang dirasakan kurang etis yaitu masih banyaknya penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, ada pejabat yang memanfaatkan jabatan untuk meminta fasilitas lebih dari rekanan/ mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku serta sikap pembiaran pegawai ketika pegawai lain bertindak merugikan di lingkungan tempatnya bekerja. Penegakan hukum juga masih belum maksimal dijalankan. Kondisi ini disebabkan salah satunya adalah karena kurangnya kesadaran pegawai untuk merasa memiliki institusi, sehingga pekerjaan yang dilakukan hanyalah sebatas kewajiban sehingga pelayanan yang maksimal terabaikan. Dari hasil tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa dengan masih terdapatnya perilaku yang kurang etis serta didukung dengan penegakan hukum yang belum maksimal mengakibatkan ASN akan menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Kultur organisasi pada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu sudah baik. Instansi merupakan tempat bekerja ASN yang dapat memenuhi kebutuhan, sehingga kultur organisasi senantiasa dijaga dalam rangka kenyamanan dan keamanan kerja untuk pemenuhan kebutuhan. Tingkat kecenderungan melakukan kecurangan (fraud) pada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu termasuk rendah. Walaupun demikian masih terdapat indikasi terjadinya kecurangan yang terjadi yang dapat dilihat dari pencatatan biaya yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, sering terjadi kekurangan barang yang diterima dari pembelian dan sisa anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus. Artinya adalah masih terdapat indikasi kecurangan yang terjadi walaupun masih dalam kategori yang kecil.

Penelitian ini menggunakan model pendekatan variance based atau component based dengan metode Partial Least Square (PLS). Di dalam PLS model struktural hubungan antar variabel laten disebut inner model, sedangkan model pengukuran disebut outer model. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik. Sebelum menganalisis dilakukan pengujian dahulu terhadap model empiris penelitian. Hasil pengujian dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 4.1 Hasil Analisis Algorhythm



Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Terdapat tiga nilai yang harus diperhatikan pada tahap ini yaitu pengujian validitas dengan melihat nilai convergent validity dan discriminant validity serta uji reliabilitas dengan melihat nilai cronbach's alpha dan composite reliability. Seluruh outer loading/ loading factor memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Sehingga pengukuran ini dapat disimpulkan telah memenuhi persyaratan validitas konvergen. Kemudian nilai square root atas AVE sepanjang garis diagonal lebih besar korelasinya antara satu konstruk dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki tingkat validitas yang baik. Dan nilai cronbach's alpha diatas 0,6 dan composite reliability untuk semua konstruk adalah diatas 0,7. Artinya semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi criteria (reliable). Goodnes of fit model struktural pada inner model diuji menggunakan nilai predictive-relevance (Q2). Nilai R2 setiap variabel endogen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1 : Model Struktural

	R Square	R Square Adjusted
Kecenderungan Melakukan Kecurangan (<i>Fraud</i>)	0.576	0.569

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Dari Tabel diatas dapat diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,569. Artinya adalah sebesar 56,9% variabel kecenderungan melakukan kecurangan (*fraud*) dipengaruhi oleh kesesuaian tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), alasan pembenaran (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*). Hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2 : Hasil Pengujian Hipotesis PLS

Hipotesis	Path Coefficients	T Statistics
Tekanan -> Fraud	0,246	5,611
Kesempatan -> Fraud	0,434	8,706
Alasan Pembenaran -> Fraud	-0,180	3,461
Kemampuan -> Fraud	0,283	6,579

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Dari Tabel 1 diatas maka dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis 1

Diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,246 dengan t statistic 5,611 dan p value 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik lebih besar dari 1,65 (t tabel) dan p value lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tekanan (*pressure*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap frauddi sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin kuat tekanan (*pressure*) yang disebabkan tidak sesuainya kompensasi dengan asumsi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kecenderungan fraud sebesar 0,246 dan sebaliknya, semakin kecil tekanan (*pressure*) yang disebabkan sesuainya kompensasi dengan asumsi sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kecenderungan fraud sebesar 0,246.

2. Hipotesis 2

Diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,434 dengan t statistic 8,706 dan p value 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik lebih besar dari 1,65 (t tabel) dan p value lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa kesempatan (opportunity) berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin besar kesempatan (opportunity) yang disebabkan belum efektifnya sistem pengendalian internal dan tidak proporsionalnya asimetri informasi dengan asumsi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kecenderungan fraud sebesar 0,434 dan sebaliknya, semakin kecil kesempatan (opportunity) yang disebabkan efektifnya sistem pengendalian internal dan proporsionalnya asimetri informasi dengan asumsi 1 satuan maka akan menurunkan kecenderungan fraud sebesar 0,434.

3. Hipotesis 3

Diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,180 dengan t statistic 3,461 dan p value 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik lebih besar dari 1,65 (t tabel) dan p value lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa alasan pembenaran (rationalization) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin banyak alasan pembenaran (rationalization) yang disebabkan lumrahnya perilaku tidak etis dan lemahnya penegakan hukum dengan asumsi 1 satuan, maka akan meningkatkan kecenderungan fraud sebesar 0,180 dan sebaliknya, semakin sedikit alasan pembenaran (rationalization) yang disebabkan tidak pantasnya perilaku tidak etis dan baiknya sistem penegakan hukum dengan asumsi 1 satuan, maka akan menurunkan kecenderungan fraud sebesar 0,180.

4. Hipotesis 4

Diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,283 dengan t statistic 6,579 dan p value 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-statistik lebih besar dari 1,65 (t tabel) dan p value lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa kemampuan (capability) berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin besar kemampuan (capability) dalam mengendalikan kultur organisasi dengan asumsi 1 satuan, maka akan meningkatkan kecenderungan fraud sebesar 0,283 dan sebaliknya, semakin kecil kemampuan (capability) dalam mengatur kultur organisasi dengan asumsi 1 satuan, maka akan menurunkan kecenderungan fraud sebesar 0,283.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa responden menilai tekanan (pressure) yang dirasakan ASN sesuai dengan kompensasi yang mereka terima. Kesesuaian tersebut terlihat dari kesesuaian antara gaji dengan pekerjaan yang dilakukan, tunjangan kerja dan hak-hak ASN yang diberikan sesuai kebutuhan dan utuh serta adanya promosi jabatan atas dasar prestasi kerja. Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa kesesuaian kompensasi yang dirasakan ASN akan berdampak pada profesionalnya ASN dalam bekerja, tercukupinya kebutuhan akan mengakibatkan berkurangnya tekanan kebutuhan yang dirasakan.

Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tekanan (pressure) berpengaruh positif dan signifikan terhadap frauddi sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin kuat tekanan (pressure) yang disebabkan tidak sesuainya kompensasi, akan mengakinbtakan meningkatkan kecenderungan fraud dan sebaliknya, semakin kecil tekanan (pressure) yang disebabkan sesuainya kompensasi yang diterima, maka akan menurunkan kecenderungan fraud sebesar. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati (2012) dan Wilopo (2009), yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi aparaturn pemerintah daerah tentang tindak pidana korupsi. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Darsono (2001) yang menyebutkan bahwa seseorang yang terpuaskan kompensasinya tidak akan melakukan reaksi kompromistis dalam bentuk tindakan korupsi. Jensen and Meckling (1976) menjelaskan dalam teori keagenan bahwa pemberian kompensasi yang memadai ini membuat agen (manajemen) bertindak sesuai dengan keinginan dari principal yaitu dengan memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan perusahaan. Pemberian kompensasi ini akan berdampak dalam mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa responden menilai sistem pengendalian internal yang diterapkan sudah dinilai efektif oleh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu. Walaupun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penggunaan sistem pengendalian internal yang dimanfaatkan oleh ASN yang disebabkan terbatasnya informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena terbatasnyakemampuan; kolusi atau kerjasama negatif sekelompok orang serta pelanggaran dengan sengaja oleh atasan. Kemudian asimetri informasi yang diterapkan juga sudah dinilai baik. Data transaksi keuangan merupakan salah satu yang bersifat rahasia sehingga hanya bagian keuangan saya yang bisa mengetahuinya.

Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kesempatan (opportunity) berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin besar kesempatan (opportunity) yang disebabkan belum efektifnya sistem pengendalian internal dan tidak proporsionalnya asimetri informasi, maka akan meningkatkan kecenderungan kecenderungan fraud dan sebaliknya, semakin kecil kesempatan (opportunity) yang disebabkan efektifnya sistem pengendalian internal dan proporsionalnya asimetri informasi, maka akan menurunkan kecenderungan fraud.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wilopo (2009) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Lemahnya pengendalian internal menyebabkan meningkatnya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dapat diartikan bahwa semakin besar kesempatan atau peluang maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan pun akan semakin besar. Disamping itu juga asimetri informasi yang proporsional juga berdampak kepada kecurangan yang terjadi. Semakin tidak proporsional asimetri informasi maka perbuatan kecenderungan kecurangan akan semakin meningkat karena adanya informasi yang ditutupi.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa responden menilai perilaku Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu cukup etis. Namun dari hasil tersebut masih terdapat perilaku yang dirasakan kurang etis yaitu masih banyaknya penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, ada pejabat yang memanfaatkan jabatan untuk meminta fasilitas lebih dari rekanan/ mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku serta sikap pembiaran pegawai ketika pegawai lain bertindak merugikan di lingkungan tempatnya bekerja. Hal-hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang biasa dan wajar. Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa alasan pembenaran (rationalization) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Semakin banyak alasan pembenaran (rationalization) yang disebabkan lumrahnya perilaku tidak etis dan lemahnya penegakan hukum, maka akan meningkatkan kecenderungan kecenderungan fraud dan sebaliknya, semakin sedikit alasan pembenaran (rationalization) yang disebabkan tidak pantasnya perilaku tidak etis dan baiknya sistem penegakan hukum, maka akan menurunkan kecenderungan fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2009) yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan dan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada perusahaan.

Perilaku tidak etis terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Menurut CIMA (2002) dalam Wilopo (2009) berpendapat bahwa budaya perusahaan dengan standar etika yang rendah akan memiliki resiko kecurangan akuntansi yang tinggi. Disamping itu juga penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa responden menilai kultur organisasi pada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu sudah baik. Instansi merupakan tempat bekerja ASN yang dapat memenuhi kebutuhan, sehingga kultur organisasi senantiasa dijaga dalam rangka kenyamanan dan keamanan kerja untuk pemenuhan kebutuhan. Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kemampuan (*capability*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin besar kemampuan (*capability*) dalam mengendalikan kultur organisasi, maka akan meningkatkan kecenderungan kecenderungan fraud dan sebaliknya, semakin kecil kemampuan (*capability*) dalam mengatur kultur organisasi, maka akan menurunkan kecenderungan fraud.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zulkarnain (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi terhadap fraud. Peran kultur organisasi sangat penting, yaitu sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengelola dan mengalokasikan sumber daya organisasi serta sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal. Semakin besar otoritas dalam pengelolaan kultur organisasi maka kecenderungan fraud akan semakin besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut : Tekanan (*pressure*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Semakin kuat tekanan (pressure) yang disebabkan tidak sesuainya kompensasi, maka akan meningkatkan kecenderungan fraud dan sebaliknya, semakin kecil tekanan (pressure) yang disebabkan sesuainya kompensasi maka akan menurunkan kecenderungan fraud. Kesempatan (opportunity) berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin besar kesempatan (opportunity) yang disebabkan belum efektifnya sistem pengendalian internal dan tidak proporsionalnya asimetri informasi, maka akan meningkatkan kecenderungan kecenderungan fraud dan sebaliknya, semakin kecil kesempatan (opportunity) yang disebabkan efektifnya sistem pengendalian internal dan proporsionalnya asimetri informasi maka akan menurunkan kecenderungan fraud. Alasan pembenaran (rationalization) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Semakin banyak alasan pembenaran (rationalization) yang disebabkan lumrahnya perilaku tidak etis dan lemahnya penegakan hukum, maka akan meningkatkan kecenderungan kecenderungan fraud dan sebaliknya, semakin sedikit alasan pembenaran (rationalization) yang disebabkan tidak pantasnya perilaku tidak etis dan baiknya sistem penegakan hukum, maka akan menurunkan kecenderungan fraud. Kemampuan (capability) berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Semakin besar kemampuan (capability) dalam mengendalikan kultur organisasi, maka akan meningkatkan kecenderungan kecenderungan fraud dan sebaliknya, semakin kecil kemampuan (capability) dalam mengatur kultur organisasi, maka akan menurunkan kecenderungan fraud sebesar 0,283.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : Masih terdapat kelemahan dalam penggunaan sistem pengendalian internal yang disebabkan terbatasnya informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena terbatasnya kemampuan; kolusi atau kerjasama negatif sekelompok orang serta pelanggaran dengan sengaja oleh atasan. Untuk itu sangat diperlukannya pengawasan yang maksimal agar sistem pengendalian internal berjalan dengan efektif.

Sering terjadinya perilaku tidak etis berupa penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, ada pejabat yang memanfaatkan jabatan untuk meminta fasilitas lebih dari rekanan/ mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku serta sikap pembiaran pegawai ketika pegawai lain bertindak merugikan di lingkungan tempatnya bekerja. Untuk itu diharapkan adanya penegakan hukum yang tegas kepada siapapun ASN yang melakukan perbuatan tidak etis.

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode wawancara serta angket terbuka dalam penelitian, agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disamping itu juga perlu menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan frauddi sektor pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, Rabi'u, Mansor, Noorhayati dan Nuhu, Muhammad Shahir, 2015, Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory: Understanding the Convergent and Divergent for Future Research. *European Journal of Business and Management*, Universiti Sultan Zainal Abidin. Vol.7, No. 28
- Albrecht et. al., 2012. *Fraud Examination, Third Edition*, South Western, Chengage Learning, USA
- Alatas. 1987. *Korupsi Sifat Dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Indah Populer, Jakarta.
- Beasley, M. 1996, An Empirical Analysis of the Relation Between The Board Of Director Composition And Financial Statement Fraud, *The Accounting Review*, Vol. 71. pp.443-465.
- Bologna, G. Jack., Robert J.Lindquist and Joseph T.Wells. 1993, *Investigation Audit. 4thEdition*, Prentice-Hall, New Jersey
- Boynton, W.C., Johnson R.N., Kell, W.G. 2016, *Modern Auditing*, Erlangga, Jakarta.
- COSO, 2004, *Enterprise Risk Management–Integrated Framework*. the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Cressey, D. R. 1953, *Other People's Money*, Patterson Smith, Montclair, NJ, pp.1-300.
- Darsono. 2001, *Belajar dan Pembelajaran*, IKIP Semarang Press, Semarang
- Handoko. 2013, *Manajemen, Edisi Kedua*, Cetakan Ketigabelas, BPFE Yogyakarta.
- Hendriksen, E.S., dan M. Breda.1992, *Accounting Theory*, 5th. Edition, Richard Irwin Inc., USA
- Jensen & Meckling, 1976, The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Financial and Economics*, 3:305-360.

- Mulyadi. 2012, Akuntansi Biaya, Edisi ke-5. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Rukmawati, A.D. 2011, Persepsi Manajer dan Auditor Eksternal Mengenai Efektivitas Metode Pendeteksian dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Keuangan, Diponegoro Jurnal of Accounting.
- Schein, Edgar H, 1992, Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, San Francisco.
- Smith, AL. 1997, Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology. Oxford University Press. Oxford.
- Stephen P. Robbins, 1996, Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi.
- Tang, T., & Chiu, R. 2003, Income, money ethics, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: is the love of money the root of evil for Hong Kong employees?, Journal of Business Ethics, Vol. 46, pp. 13-30.
- Wilopo. 2009, Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi X Padang.